

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang, khususnya Indonesia memerlukan kesetaraan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan perekonomian namun juga bisa diwujudkan dengan mengoptimalkan mutu sumber daya manusianya maupun kelayakan hidup masyarakat. Dapat dilihat dari aspek perspektif Kesehatan, dalam proses implementasinya pemerintah perlu memperhatikan bahwa harus mampu membentuk inovasi atau program pembangunan berkelanjutan yang lebih tepat sasaran, sehingga tercipta pemerataan. Pembangunan tidak hanya berkembang dari segi kepentingan pemerintah dan infrastruktur tetapi harus fokus pada aspek pendukung lainnya (Ahmad et al., 2023)

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) tinggi badan yang dibawah rata-rata usia akibat kekurangan gizi jangka Panjang atau kronis dikenal sebagai stunting dan hal ini biasanya dikaitkan dengan kemiskinan, berat badan lahir rendah dan dampak kesehatan bagi ibu hamil, infeksi yang berulang serta kekurangan gizi. (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023). Fokus pada kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Stunting diklasifikasikan oleh pemerintah menggunakan kurva, mirip dengan tinggi badan menurut usia. Indikator ini membantu identifikasi dan pengukuran stunting pada anak sehingga memungkinkan penerapan intervensi pertumbuhan dan perkembangan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu pemerintah melalui fungsi distribusinya harus memperhatikan tingkat Kesehatan dan angka harapan hidup Masyarakat khususnya kelompok menengah kebawah serata berupaya menstabilkan pendapatan dan kehidupan Masyarakat. Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 diterangkan kesehatan termasuk bagian dari hak asasi manusia serta suatu cita-cita yang hendak diwujudkan negara. Guna membentuk SDM Indonesia maka

hendaknya mengoptimalkan daya saing serta ketahanan pembangunan, berbagai upaya dapat diterapkan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan warganya optimalnya dengan prinsip partisipatif, non diskriminatif, serta berkelanjutan.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang hingga saat ini belum terselesaikan. Indonesia masih menyiapkan sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi jika Indonesia Sejahtera di tahun 2025 dan generasi emas tahun 2045 namun kenyataannya Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan, gizi dan Kesehatan. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap stunting, selain gizi buruk pada anak kecil dan Wanita hamil. Dengan demikian 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) merupakan masa dimana balita memerlukan intervensi paling kuat untuk menurunkan angka kejadian stunting. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah Teknik pengasuhan yang tidak efektif seperti minimnya wawasan ibu terkait gizi maupun kesehatan sebelum, saat hingga setelah melahirkan (Agustina, 2021).

Di Kabupaten Malang stunting pada balita masih ditemukan, khususnya di wilayah Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Stunting di Desa Ampeldento kebanyakan terjadi pada umur 17–59 bulan. Implementasi UU No. 6 tahun 2014 mengenai Desa teramat membantu guna melaksanakan pencegahan stunting pertumbuhan Desa (Hamdi et al., 2023). Salah satu implikasi UU Desa adalah sejak 2015 sudah dilakukan penyaluran dana desa yang menjadi sumber penghasilan Desa. Merujuk peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal maupun transmigrasi No. 16 tahun 2018 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Adapun prioritas pemanfaatan dana Desa dibidang Kesehatan adalah perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Peran pemerintah Desa sangat penting dalam menurunkan stunting.

Strategi penanggulangan stunting juga bisa dengan memaksimalkan posyandu. Posyandu berfungsi sebagai pendeteksi awal, penanganan dan konsultasi awal. Konsultasi mengenai stunting, para kader posyandu harus

dibekali untuk berpartisipasi aktif. Upaya penanggulangan stunting selama ini hanya terfokus pada deteksi dini sebagai Upaya pencegahan. Jika keadaan darurat stunting terus berlanjut Indonesia akan menghadapi konsekuensi yang signifikan. Tahun 2035 menandai berakhirnya tetap bonus demografi yang dapat berubah dari sebuah keuntungan menjadi sebuah beban negara. Balita yang mengalami stunting menghadapi banyak masalah selain fakta mereka bertumbuh kecil, salah satu hal yang paling mendesak yang cenderung dikhawatirkan Masyarakat dalam hal Kesehatan adalah masalah yang dianggap serius.

Peran Pemerintah sangat penting dalam menanggulangi kasus stunting khususnya Pemerintah Desa. Karena pemerintah desa merupakan pemerintah yang lebih dekat dengan Masyarakat dan bisa langsung mengetahui kondisi masyarakatnya. Diluar peran Pemerintah Desa ada juga Bidan Desa serta kader pkk yang harus lebih mengerti keadaan balita yang stunting. Bidan Desa dan kader pkk bisa memberi arahan kepada ibu hamil bagaimana agar nutrisi dan gizi terpenuhi di masa kandungan agar mencegah terjadinya stunting.

Keberhasilan sebuah Desa tidak dipisahkan dari kesejahteraan penduduknya dan kondisi perekonomiannya. SDM yang baik serta berkemampuan serta sumber daya alam dengan kualitas yang sesuai, untuk menghadapi era sekarang dukungan Masyarakat sangat diperlukan. Untuk unggul dalam pertumbuhan fisik dan mental sangat penting untuk memprioritaskan Kesehatan, kecerdasan dan memberikan perhatian lebih awal.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa hal kebijakan dan peraturan yang diantisipasi membantu mencegah keterlambatan perkembangan dan disampaikan secara terpadu termasuk intervensi gizi. Konvergensi dengan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk menghindari stunting. Fase perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi merupakan titik awal konvergensi. Pilar ketiga pencegahan stunting adalah menjalani konvergensi sebagai strategi intervensi yang terkoordinasi, terintegrasi dan kooperatif. Memastikan efisiensi implementasi intervensi

lintas sektor yang bertujuan mencegah stunting di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. (Nurahadiyatika & Himmawan, 2022).

Pemerintah Indonesia menjadikan stunting yakni prioritas skala nasional dan telah menunjuk badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) selaku kepala yang menjalankan percepatan untuk menurunkan stunting. Selain itu juga pemerintah juga melakukan Upaya pencegahan stunting melalui pembangunan infrastruktur sanitasi serta air minum guna peningkatan mutu hidup individu (Salsabila et al., n.d.). Upaya ini mencakup beberapa aspek mulai dari pemberian asi, intervensi gizi, hingga pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan balita dan mencegah stunting (Kukerta Lembah Sari, 2022).

Pemerintah meningkatkan taraf hidup dan menghentikan stunting, pemerintah membangaun infrasturktur air minum dan fasilitas sanitasi, dengan menyediakan air minum dan fasilitas sanitasi, serta intervensi sensitive lainnya. Program pamsimas dan menantu sanimas membantu mencegah stunting. Selain itu program padat karya direktorat jenderal pelaksana infrastruktur berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk mendistribusikan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi berbasis Masyarakat(Salsabila et al., n.d.).

Sejumlah faktor lain yang lebih rumit yang berkontribusi terhadap stunting di Masyarakat menjadikan masalah yang lebih dari sekedar ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan pangan anak-anak mereka. Salah satunya adalah pola asuh budaya yang tidak mendorong anak untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan.

Adapun tugas dari Pemerintah Desa menurut Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2021 untuk menekan laju stunting yakni:

A. Pasal 8 ayat 3

Melaksanakan rancangan aksi nasional pada pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting yang termasuk aktivitas prioritas setidaknya mencakup:

1. Menyediakan data keluarga yang memiliki risiko stunting;
2. Mendampingi keluarga yang memiliki risiko stunting;
3. Mendampingi seluruh calon pengantin maupun pasangan usia subur (PUS);
4. Melakukan survey keluarga yang memiliki risiko stunting; serta
5. Mengaudit persoalan stunting.

B. Pasal 10

Intisari dari pasal ini yaitu guna mempercepat turunnya persoalan stunting, pemerintah di berbagai tingkatan melakukan berbagai langkah seperti menguatkan perencanaan dan anggaran, mengoptimalkan pelaksanaan program, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan yang lebih baik, serta mengoptimalkan kapasitas SDM.

C. Pasal 11

Pasal 11 menjelaskan bahwasanya Pemdes mengatur dan menjalankan langkah-langkah untuk mengurangi stunting di desa, dana desa difokuskan oleh Pemdes guna mendukung penanganan stunting serta program pembangunan desa dimaksimalkan oleh Pemdes guna mendukung upaya meminimalkan stunting.

D. Pasal 22

Pada upaya mengatasi stunting, Pemdes menugaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tiap desa/kelurahannya guna melaksanakan koordinasi, penyatuan, serta pengevaluasian upaya tersebut di masing-masing tingkatannya.

E. Pasal 23

Memantau, mengevaluasi serta melaporkan keterlaksanaan akselerasi penurunan stunting berdasarkan pada wewenang yang diberikan.

Desa Ampeldento sudah menerapkan konvergensi. Konvergensi di Desa Ampeldento yaitu konvergensi rumah sehat. Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat yang ada dengan memberikan bantuan bahan pokok. Adanya program ini juga bisa memberi dampak positif terhadap Masyarakat desa dan bisa memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh balita yang mengalami stunting.

Pengkajian terhadap upaya dari Pemdes pada penurunan angka stunting khususnya di Desa Ampeldento. Pada penelitian ini akan dilakukan pengkajian bagaimana program pemerintah Desa dalam menekan angka stunting agar tidak semakin tinggi, karena Desa Ampeldento termasuk desa yang memiliki angka stunting yang tinggi di Kecamatan Karangploso.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peranan dari Pemerintah Desa Ampeldento guna menangani kasus stunting?
- b. Apa program yang dilakukan Pemerintah Desa Ampeldento untuk menangani kasus stunting?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini agar diketahui peranan Pemdes terkait upaya menangani penurunan angka stunting.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil temuan menjadi acuan guna mengembangkan wawasan mengenai persoalan gizi balita khususnya stunting dalam proses tumbuhkembang balita serta memperluas Pendidikan gizi berkaitan pada pola asuh ibu saat memberikan makan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan untuk Masyarakat umumnya mengenai pentingnya peran pemerintah Desa dalam penanggulangan stunting di Desa Ampeldento.

1.5 Definisi Konseptual

1. Peran

Peran diterangkan oleh ahli yaitu posisi ataupun status yang dinamis. Kozier Barbara menjelaskan peran mencakup perilaku yang diharapkan oleh orang lain berdasarkan posisi seseorang dalam suatu sistem. Peran ini dipengaruhi oleh faktor sosial yang stabil, baik dari dalam maupun luar.

Adapun peran dalam konteks penelitian ini mengacu pada bagaimana pemerintah desa dalam menangani kasus stunting yang ada. Peran mencakup kontribusi pemerintah desa, bidan desa dan kader pkk dalam penanganan stunting dengan memberikan arahan kepada ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita agar tidak terjadinya stunting. Memberikan bantuan makanan yang memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan balita yang stunting (Hadina et al., 2022).

2. Pemerintah Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa ataupun desa adat yakni kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah yang sudah ditentukan, berwenang mengatur maupun mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Masyarakat setempat memiliki hak mengacu pada inisiatif masyarakat, hak tradisional maupun hak asal-usul yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintah. Pemdes terdiri dari Kades beserta perangkat desa lainnya, seperti Sekdes, pelaksana teknis desanya maupun kepala wilayah (Suhroh & Pradana, 2021).

3. Stunting

Stunting terjadi ketika individu memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rerata usianya. Ini terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis hingga menyebabkan mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari seharusnya (Astawan, 2022). Gizi buruk dapat terjadi sejak masa kehamilan sampai beberapa hari sesudah

kelahiran, sementara keterlambatan perkembangan biasanya baru terjadi sesudah anak tersebut usia dua tahun.

1.6 Definisi Oprasional

Definisi operasional yang dijelaskan oleh sugiyono 2015 yaitu atribut ataupun nilai terhadap suatu objek maupun aktivitas dengan suatu variasi sebagaimana ketentuan dari peneliti lalu diselidiki dan didapat kesimpulannya.

Upaya pencegahan Stunting dari Pemerintah Desa Ampeldento meliputi:

1. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting Desa Ampeldento
2. Pendataan Balita Terindikasi Stunting
3. Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting

1.7 Metode Penelitian

Metode riset dilaksanakan memakai metode kualitatif berpendekatan deskriptif. Bogdan Dan dan Biglen (1998) mengemukakan riset kualitatif deskriptif sebagai pendekatan dalam menerangkan detail keadaan, karakteristik maupun proses sebuah kejadian melalui pengumpulan data secara relevan.

Tujuan dilaksanakan riset tersebut guna memahami proses penanganan stunting yang ada di Desa Ampeldento. Siapa yang terlibat, peran pemerintah Desa, Bidan Desa serta kader pkk dan berbagai faktor yang memberi pengaruh pada keberhasilan. Riset kualitatif deskriptif memberi informasi lebih dalam mengenai peran pemerintah desa pada upaya penanganan kasus stunting di Desa Ampeldento.

1. Sumber Data

Pada riset ini menerapkan sumber data ataupun informannya sebagai kunci informasi guna mendapat datanya. Sumber data tersebut yakni:

2. Data Primer

Yaitu data didapatkan langsung melalui hasil observasi, kemudian dituliskan pertama kalinya dari narasumber.

3. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat tidak langsung melalui objek riset. Ketika mendapatkan data ini yang penting yakni ada ataupun tidaknya data didapat dari internet, arsip dan buku-buka penunjang penelitian.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data yang dipergunakan pada riset ini mencakup:

5. Observasi

Teknik cara mengumpulkan data melibatkan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, dikenal sebagai pengamatan observasi atau observasi. Jadi, untuk memperoleh data penelitian, pengertian observasi riset kualitatif yakni aktivitas pengamatan yang dilaksanakan langsung pada objeknya agar diketahui dimana objek, bagaimana situasinya, setting dan makna yang tersirat.

Metode penelitian observasional untuk mengumpulkan data. Teknik observasi tidak terstruktur digunakan oleh peneliti dalam penyidikan ini. observasi tidak terstruktur berarti bahwa alat observasi tidak dipersiapkan secara sistematis sejak awal karena peneliti tidak yakin akan terjadinya, data yang berkembang serta bagaimana data barunya yang harus dipelajari. Peneliti hanya melakukan pengamatan dengan menggunakan tanda tanda pengamatan bukan instrument biasa.

6. Wawancara

Wawancara sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan percakapan atau mengajukan pertanyaan wawancara tentu saja dalam riset kualitatif lebih dalam sebab mereka ingin mengungkapkan informasi yang langsung muncul melalui informan yaitu Kepala Desa Ampeldento, Kasi Kesejahteraan Sosial, Bidan Desa dan Kader Kesehatan.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya sketsa pertanyaan yang perlu ditanyakan. Peneliti menerapkan wawancara guna memastikan prosesnya telah berjalan lancar. Namun, masih pada topik yang ditanyakan.

7. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan gambar, pembuatan peta, dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kelengkapan data, memahami kendala penelitian dan memastikan keaslian data. Foto-foto arsip atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan peneliti. Bahan arsip dan gambar lokasi penelitian digunakan peneliti sebagai dokumentasi.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat dimana peneliti melakukan riset guna mendapat informasi penunjang penelitian. Lokasi riset dilaksanakan pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

